

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Tolok ukur keberhasilan suatu daerah tidak hanya dapat dilihat dari keaktifan pemerintah dalam melakukan pembangunan infrastruktur daerah tersebut, namun juga dapat dilihat dengan seberapa besar peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan fundamental yang menyangkut kepentingan umum. Terakomodirnya kebutuhan masyarakat ini dapat dilihat dari pelayanan publik yang diberikan pemerintah dan seberapa besar tingkat kepuasan masyarakat atas kinerja pemerintah.

Idealnya kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan daerah adalah untuk tercapainya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan dan kepentingan bukan justru sebaliknya. Kekuasaan malah digunakan untuk memenuhi ambisi dan kebutuhan pribadi, kelompok tertentu yang menimbulkan penyalahgunaan wewenang, sebagaimana yang diungkapkan oleh Lord Acton (dalam Budiarjo, 2010, hlm. 175) bahwa:

manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung untuk menyalahgunakannya, akan tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan absolut sudah pasti akan menyalahgunakannya (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutly*).

Sebagaimana ungkapan di atas, ketika seseorang diberikan kekuasaan maka ada kecenderungan akan menyalahgunakan kekuasaannya, sehingga perlu adanya kontrol sebagai upaya mencegah kesewenang-wenangan.

Kontrol atas kekuasaan itu bisa dilakukan dalam bentuk aturan atau hukum, maupun kontrol sosial yang dilakukan oleh element masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam melakukan kontrol sosial menjadi sangat penting karena masyarakatlah yang merasakan dampak dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah. Mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang memiliki kualitas

intelektual dan kepekaan sosial yang lebih tinggi di antara masyarakat pada umumnya, tentu memiliki peluang yang lebih besar untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan pemerintah.

Melalui organisasi, mahasiswa akan lebih mudah menjalankan fungsinya sebagai *pressure group*. Seperti yang diungkapkan Rudiarto (2010, hlm. 2) ada beberapa catatan momentum yang monumental dari sejarah mahasiswa Indonesia yaitu:

Tahun 1908 lahirnya Boedi Oetomo, tahun 1928 lahirnya sumpah pemuda, tahun 1945 melahirkan gerakan mahasiswa 45, tahun 1966 melahirkan angkatan 66 orde baru, tahun 1974 melahirkan gerakan anti modal asing Jepang yang dikenal dengan malari 74, tahun 1978 melahirkan gerakan perlawanan perlawanan terhadap Soeharto langsung yang dikenal dengan gema 77/78, tahun 1980-an melahirkan gerakan mahasiswa pasca NKK /BKK, dan tahun 1998 melahirkan gerakan mahasiswa 98 yang menumbangkan rejim pemerintahan Soeharto.

Dari pendekatan historis ini kita dapat mengetahui bahwa sejarah telah mencatat pergerakan mahasiswa dalam melakukan kontrol sosial dan perlawanannya terhadap ketidakadilan kebijakan pemerintah. Gerakan ini diinisiasi dari perhimpunan atau pengorganisasian sehingga pergerakannya memberikan dampak yang sangat signifikan. Semangat perjuangan yang didasarkan pada idealisme, patriotisme, kebernian, keterbukaan dan nilai-nilai luhur yang diyakininya. Landasan gerak inilah yang membuat mahasiswa begitu dikenang dan dirindukan keterlibatannya dalam membantu mengontrol pemerintahan di negeri ini.

Keterlibatan mahasiswa dalam mengontrol kebijakan pemerintah saat ini tidak terlepas dari peranan organisasi mahasiswa, baik itu organisasi intra kampus maupun organisasi ekstra kampus. Perbedaan antara organisasi intra kampus dan organisasi ekstra kampus terletak dalam cakupan gerakannya. Jika organisasi intra kampus gerakan mahasiswanya hanya mencakup lingkup kampus tempat mereka berada sedangkan organisasi ekstra kampus cakupan gerakan mahasiswanya meliputi kampus, regional maupun nasional. Dari hal ini dapat di lihat bahwa

eksistensi dari organisasi ekstra kampus lebih diperhitungkan daripada organisasi intra kampus.

Eksistensi organisasi ekstra kampus yang sampai saat ini masih aktif dalam bergerak mengontrol kebijakan pemerintahan salah satunya adalah Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Himpunan Mahasiswa Islam yang lebih dikenal dengan nama HMI adalah organisasi eksternal yang menghimpun aktivis-aktivis mahasiswa islam. Dalam konstitusi HMI atau AD/ART disebutkan bahwa Organisasi ini pertama kali didirikan di Yogyakarta pada tanggal 14 *Rabiul Awal* 1366 H atau bertepatan dengan tanggal 15 Februari 1947 yang diinisiasi oleh seorang mahasiswa kelahiran Padang Sidempuan yang bernama Larpan Pane. Himpunan ini berasaskan Islam dan memiliki tujuan terbinannya insan akademis pencipta pengabdian yang bernapakan islam dan bertanggungjawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah *Subhanahu wata'ala*. Berfungsi sebagai organisasi kader dan berperan sebagai organisasi perjuangan.

Sesuai dengan konteksnya, berdasar dokumen *Basic Training* ada beberapa alasan yang melatarbelakangi lahirnya HMI adalah sebagai berikut (1) penjajahan belanda terhadap Indonesia dan tuntutan perang kemerdekaan, (2) kesenjangan dan kejumudan umat islam dalam pengetahuan, pemahaman dan penghayatan serta pengamalan ajaran islam, (3) kebutuhan akan pemahaman dan penghayatan keagamaan, (4) munculnya polarisasi politik, (5) perkembangan paham dan ajaran komunis dikalangan masyarakat dan mahasiswa, (6) kedudukan perguruan tinggi dan dunia kemahasiswaan yang strategis, (7) kemajemukan bangsa Indonesia (8) tuntutan modernisasi dan tantangan masa depan.

Latar belakang lahirnya HMI merupakan salah satu bentuk kepedulian HMI sebagai organisasi kemahasiswaan yang independen dalam mengawal masalah bangsa dan negara. Menurut Affandi (2011, hlm. 89) 'keberadaan HMI konsisten dengan independen'. Konsep ini yang membuat HMI sampai saat ini bertahan dan mampu menjawab berbagai persoalan organisasi, masyarakat, bangsa dan negara. Selaras dengan pendapat tersebut konsepsi independensi dalam HMI

telah tersirat dalam konstitusi HMI pasal 6. Independensi HMI menjadikan organisasi ini tidak terikat dengan kepentingan apapun, baik itu partai politik maupun lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan unsur pemerintahan.

Tidak terikatnya HMI dari interpersi kepentingan pemerintahan membuat organisasi ini lebih leluasa dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintahan. Dengan memiliki modal intelektual, keberanian dan jiwa patriotisme, maka kader kader HMI terus konsisten melakukan pengawalan dan kontrol terhadap sistem pemerintahan demi tercapainya cita cita yang dituliskan dalam *mission* HMI yaitu terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah SWT. Apalagi dengan semakin terbukanya kebebasan mengemukakan pendapat dan kemudahan untuk mendapatkan informasi mengenai kebijakan pemerintah, hal ini akan lebih mempermudah bagi HMI dalam melakukan kontrol terhadap kebijakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“kontrol Sosial HMI terhadap Kebijakan Pemerintah Kota Bandung”**. Mengingat HMI merupakan element masyarakat yang mempunyai peranan cukup besar dalam proses pengontrolan terhadap kebijakan pemerintah dari masa kemasa, maka akan sangat menarik untuk melakukan penelitian terhadap peranan HMI dewasa ini dalam melakukan kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Dalam rangka menjawab masalah dalam penelitian ini maka peneliti membuat rumusan masalah secara umum adalah bagaimana persepsi pengurus HMI cabang Bandung terhadap partisipasi kader dalam mengkritisi kebijakan pemerintah Kota Bandung. Untuk mempermudah operasional penelitian maka peneliti membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa saja program HMI Cabang Bandung dalam mengontrol perencanaan kebijakan pemerintah Kota Bandung?

2. Bagaimana sikap HMI Cabang Bandung terhadap Implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung?
3. Bagaimana hambatan HMI Cabang Bandung dalam mengontrol kebijakan pemerintah Kota Bandung?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan HMI Cabang Bandung dalam mengatasi hambatan mengontrol kebijakan pemerintah Kota Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan umum

Secara umum tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontrol sosial HMI terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung.

2. Tujuan khusus

Berdasarkan rumusan masalah di atas tujuan dari penelitian ini untuk mendapatkan informasi dan mengolah informasi tersebut yang berkaitan dengan:

- a. Mengetahui program kerja HMI Cabang Bandung dalam mengontrol perencanaan kebijakan pemerintah Kota Bandung.
- b. Mengetahui sikap HMI Cabang Bandung terhadap implementasi Kebijakan pemerintah Kota Bandung.
- c. Mengetahui Bagaimana hambatan yang dihadapi HMI Cabang Bandung dalam mengontrol implementasi kebijakan pemerintah Kota Bandung
- d. Mengetahui solusi yang telah dibuat pengurus HMI Cabang Bandung terhadap hambatan yang dihadapi dalam mengontrol kebijakan pemerintah Kota Bandung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Melalui penelitian ini, penulis berharap dapat memberikan sumbangsih gagasan atau pemikiran yang mudah-mudahan berguna dalam tataran teoritis bagi

pengembangan keilmuan sesuai dengan penelitian ini. Peneliti juga berharap penelitian yang dilakukan ini bisa menambah wawasan berupa fakta fakta di lapangan tentang partisipasi dalam berorganisasi.

2. Manfaat secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara langsung maupun tidak langsung dalam membangun budaya partisipasi dalam kehidupan sehari hari.

- a. Bagi kalangan pendidik khususnya bagi calon pendidik PKn, penelitian ini memberikan bekal dalam membangun *civic partisipatory* peserta didik.
- b. Bagi kalangan organisatoris, penelitian ini bisa menjadi salah satu rujukan dalam menganalisis partisipasi anggota organisasi tersebut.
- c. Bagi pengurus HMI Cabang Bandung, mudah-mudahan penelitian ini bisa menjadi jawaban atas tantangan organisasi, untuk meningkatkan budaya partisipasi organisasi serta kekeritisan kader terhadap kebijakan pemerintah.

E. Struktur Penulisan Skripsi

Struktur organisasi dalam penelitian ini berisi rincian urutan penulisan dari setiap bab dan bagian bab, dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. BAB I Pendahuluan. Bab ini akan menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan struktur organisasi skripsi.
2. BAB II Kajian Pustaka. Pada bab ini diuraikan teori-teori yang mendukung penelitian.

3. BAB III Metode Penelitian. Pada bab ini penulis menjelaskan metodologi penelitian, teknik pengumpulan data dan tahapan penelitian yang digunakan dalam penelitian yang penulis teliti.
4. BAB IV Temuan dan Pembahasan. Pada bab ini peneliti mengolah dan menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian tentang kontrol sosial HMI terhadap kebijakan pemerintah Kota Bandung.
5. BAB V Simpulan, Implikasi, dan Rekomendasi. Dalam bab ini penulis berusaha memberikan kesimpulan, implikasi dan saran sebagai penutup dari hasil penelitian dan permasalahan yang telah diidentifikasi dan dikaji dalam skripsi.